

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE:  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 4

# Krisis Energi Listrik dan Solusinya

TAHUN 2006

## Dr. Syamsir Abduh

Peneliti Pada Pusat Kajian Energi dan  
Sumber Daya Mineral Universitas Trisakti



**A**

pakah krisis energi listrik benar-benar akan terjadi? Jika melihat fakta, terjadi *gap* yang besar antara permintaan dan suplai listrik. Pemerintah (PLN) sepertinya tidak mampu membangun pembangkit baru dengan alasan keterbatasan sumber dana.

Menurut hemat penulis, sumber dana bagi penyediaan listrik dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti dari penjualan listrik kepada pelanggan, dan sumber dana pemerintah yang kemudiannya harus diseimbangkan dengan tingkat pendapatan PLN agar kelangsungan pembangkitan dapat berkelanjutan.

Selain dari kedua sumber di atas, perusahaan listrik dapat memperoleh dana yang berasal dari investasi. Namun terdapat kelemahan dari alternatif ini karena *rate* yang diinginkan oleh investor umumnya lebih tinggi dari *rate of return* yang ditetapkan oleh perusahaan listrik.

Ketiga sumber pendanaan di atas akan mewujudkan perbedaan kepentingan. Pertama, perusahaan listrik akan berusaha bekerja efisien dalam pengoperasian dan penggunaan modal. Kedua, pemilik akan mengutamakan peningkatan keuntungan dari waktu ke waktu. Ketiga, investor akan mementingkan *return* dari hasil investasi mereka.

Skenario di atas menggambarkan bahwa penyediaan dan pengelolaan tenaga listrik bukanlah persoalan sederhana, apalagi dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil.

Dalam kondisi seperti itu: Pertama, pemerintah kesulitan finansial dalam memenuhi penyediaan tenaga listrik yang terus meningkat. Kedua, menurunnya investasi baru di bidang kelistrikan akibat rendahnya *rate of return* dan tingginya *country risk*. Hal itu menyebabkan perusahaan listrik akan berusaha menaikkan harga listrik (TDL), padahal harga mempunyai pengaruh (*price do matter*).

Bagaimana mengatasi persoalan ini? Beberapa skenario dapat dijalankan: Pertama, persoalan investasi dapat dipecahkan melalui upaya kontrak jangka panjang. Mengapa? Investor umum-

nya akan kesulitan jika diberikan opsi jangka pendek, karena jika terjadi sesuatu dan lain hal yang menyebabkan kontrak diputuskan, investor akan kesulitan menjual aset (pembangkit) karena jaringan listrik hanya dimiliki oleh PLN. Jadi, perlu adanya kepastian investasi (menurunkan risiko investasi). Kedua, menghindari terjadinya kerugian kesejahteraan (*welfare loss*).

### Efisiensi dan Ekuiti

*Welfare loss* bagi ekonom adalah sumber daya yang tidak bermanfaat. Kurangnya perlengkapan maupun adanya kendala menyebabkan solusi sering tidak optimal. Seorang ekonom tentu menyadari situasi klasik itu, konflik antara efisiensi dan ekuiti. Agar konflik ini tidak terjadi, perlu pemisahan dalam pelaksanaan kebijaksanaan tersebut.

Jan Tinbergen mengingatkan bahwa "*number of instruments for policies more than number policies*". Terdapat dua kebijaksanaan di sektor listrik, yaitu efisiensi dan ekuiti. Instrumen pelaksana kebijakan itu harus paling kurang dua buah.

Dalam kerangka berfikir Jan

Timbergen ini, penyelesaian konflik efisiensi dan ekuiti pada TDL, dapat ditetapkan dengan dua cara. Pertama, penyelesaian di luar tarif. Teknik ini khas Timbergen, menyelesaikan efisiensi dan ekuiti secara terpisah.

Contoh yang pernah ada adalah *food stamp* dan *energy stamp*. Keduanya pernah diberlakukan di Amerika Serikat. Sebagai ilustrasi, misalnya penerima *food stamp* tetap berbelanja di supermarket pada pasar yang dianggap kompetitif, jadi efisien. Pada waktu selesai berbelanja, *food stamp* kemudian diserahkan dan merupakan potongan dari belanjaan, pemilik supermarket kemudian menukarkan semua *food stamp* yang diterimanya pada kas negara menjadi uang tunai.

Unsur ekuiti dipenuhi karena adanya *food stamp*. Skema ini dapat dijalankan pemerintah pada

---

## **"Penyediaan dan pengelolaan tenaga listrik bukanlah persoalan sederhana, apalagi dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil."**

---

TDL PLN. Siapa yang berhak menerima subsidi maupun jumlahnya sepenuhnya di tangan pemerintah dan/atau DPR, katakanlah dalam bentuk suatu *electricity stamp*.

TDL ditetapkan pada tingkat harga marjinal jangka panjang, pelanggan tetap membayar TDL menurut harga marjinalnya, tetapi kemudian langsung mendapatkan potongan sebesar *stamp* yang dimilikinya. Tentunya potongan ini tidak boleh lebih besar dari tagihan listrik yang ditagihkan PLN waktu itu. PLN kemudian mengumpulkan semua

*stamp* lalu menukarkannya menjadi uang tunai pada Kas Negara, Kedua, penyelesaian di dalam tarif. Dalam rangka memperbaiki alokasi sumber daya nasional, maka harga ditetapkan pada tingkat biaya marjinal jangka panjang, kemudian pada tingkat selanjutnya dilakukan koreksi untuk menampung tujuan ekuiti dan hasil akhirnya merupakan struktur tarif yang bebas dari *welfare loss*.

### **Kebijakan Harga**

*Welfare loss* lainnya terkait manajemen beban listrik dan hubungannya dengan kebijakan penentuan harga. Secara teoritis, suatu harga listrik yang ditetapkan atas prinsip biaya marjinal akan memberikan *price signal* ke pelanggan untuk menggunakan listrik secara efisien sehingga memengaruhi pola pemakaian listrik pelanggan itu. Sebagai contoh, pemakai industri yang biaya listriknya merupakan komponen besar dari total biaya produksi, mereka bekerja dalam *multi-shift* akan sangat sensitif kepada insentif tarif.

Di Eropa (Prancis, Belgia, Swedia dan Inggris) merupakan suatu kebiasaan bagi perusahaan listrik untuk memengaruhi pola harian pemakaian listrik pelanggan melalui tarif waktu beban puncak (WBP) dan di luar beban puncak (LWBP). Perusahaan listrik di negara-negara tersebut mempromosikan penggunaan peralatan listrik spesifik yang dapat memperbaiki bentuk kurva beban sistem, dengan menawarkan *time of day metering* bagi pelanggan yang menggunakan peralatan tersebut. Hal ini akan menaikkan angka faktor beban sistem dan dengan sendirinya mengurangi keperluan *peaking power plant*.

Total kurva beban sistem dapat dipengaruhi dengan dua cara yang saling berkaitan. Pertama, dengan perlakuan insentif harga melalui tarif yang berbeda menurut periode harga dalam sehari, misalnya WBP, LWBP, juga *midnight*,

dan *early morning*. Atau yang berbeda dalam setahun, *season* dan *off season*.

Skema harga yang berbeda diharapkan dapat mempengaruhi pola pemakaian listrik pelanggan. Kedua, perusahaan listrik dapat memengaruhi pola pemakaian pelanggan secara langsung dengan mengubah waktu penggunaan alat tersebut, atau dengan mempromosikan penggunaan peralatan listrik yang dapat merubah waktu penggunaan dari WBP menjadi LWBP.

Masalah manajemen beban listrik dan hubungannya dengan kebijakan harga pada WBP, adalah penting bagi PLN di masa mendatang, mengingat faktor beban sistem keseluruhan masih relatif rendah dan perlu diperbaiki.

Contohnya, pelanggan rumah tangga pada kWh sekitar 50%. Mereka menggunakan listrik terutama pada WBP, yaitu dari pukul 17.30 hingga 21.30. Manajemen beban sektor rumah tangga memerlukan analisis mendalam. Agar penghematan optimum dari sistem ini tercapai, perlu penggeseran beban ke periode LWBP. Pada saat yang sama, perlu diusahakan beban sektor rumah tangga yang datar selama 24 jam.

*Welfare loss* karena manajemen beban di sektor rumah tangga tidak begitu serius dibanding *welfare loss* karena penetapan TDL tidak di tingkat biaya marjinal jangka panjang.

Penggunaan listrik di sektor rumah tangga umumnya untuk penerangan, maka secara intuitif sangat sukar untuk mengubah pola pemakaian ke periode LWBP. Meskipun demikian, di masa mendatang masalah manajemen beban merupakan aspek yang harus diperhitungkan dalam penentuan harga listrik di Indonesia, terutama bila tanggungan menengah dijadikan andalan PLN serta pelanggan rumah tangga menggunakan listrik tidak hanya untuk sekedar penerangan. □

MONITOR BERITA

<input checked="" type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA						<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																								
KODE: <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS			<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI			<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																								
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN: 1												TAHUN 2006																		

# BPK: Defisit PLN hanya Rp10,2 triliun

Oleh BAMBANG DWI DJANUARTO  
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas audit PT PLN menyatakan defisit BUMN itu hanya Rp10,2 triliun, jauh di bawah asumsi awal sebesar Rp21 triliun.

Hal itu akibat adanya sejumlah koreksi atas biaya pokok penyediaan (BPP) listrik yang menjadi Rp93,2 triliun. Dengan pendapatan PLN dari penjualan tenaga listrik Rp 66 triliun, defisit BUMN itu menjadi Rp27,2 triliun.

Sesuai APBN 2006 yang sudah disahkan, PLN memperoleh subsidi sebesar Rp15 triliun ditambah cadangan Rp2 triliun, sehingga masih terdapat kekurangan Rp10,2 triliun untuk menutup biaya pengoperasiannya.

Sebelumnya, PLN menyatakan kebutuhan subsidi sebesar Rp38 triliun, sehingga ada defisit sebesar Rp21 triliun setelah dikurangi subsidi APBN 2006.

Dalam Laporan Audit BPK terhadap BPP PLN yang dilakukan atas permintaan DPR sebagai bahan utama membahas rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dengan pemerintah, ditemukan anggaran BPP lebih tinggi Rp4,9 triliun.

Dengan demikian, terjadi koreksi biaya BPP PLN untuk 2006 yang terdiri dari Rp3,6 triliun atau 73% merupakan koreksi dari biaya bahan bakar. Sisanya, Rp1,3 triliun, atau 27% dari koreksi biaya listrik swasta, kepegawaian, pemeliharaan, administrasi, dan biaya pinjaman.

Selain itu, BPK juga menemukan anggaran penjualan tenaga listrik tahun ini lebih tinggi dari angka rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) sebesar 831.435 MWh.

Angka anggaran penjualan yang diajukan didasarkan atas pembahasan antara PLN dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun BPK tidak menemukan bukti pendukung yang merinci perhitungan tersebut.

"Karena itu, BPK mengembalikan kepada angka anggaran awal, sesuai dengan RKAP yang merupakan koreksi kurang sebesar 831.435 MWh dari 112,8 juta MWh," ujar Kepala BPK Anwar Nasution di Jakarta, kemarin, saat jumpa pers bersama pimpinan DPR, yaitu Agung Laksono (ketua) dan Muhaimin Iskandar (wakil ketua). Turut hadir pada acara itu adalah anggota BPK Baharuddin Arironang.

Koreksi itu berimplikasi signifikan hingga memengaruhi angka MWh produksi, pembelian tenaga listrik, pemakaian gardu induk [GI], sistem distribusi, dan susut tenaga listrik.

## Tak perlu naik

Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan dengan adanya penurunan defisit itu kenaikan TDL tidak akan seberat dalam simulasi.

Bahkan, kemungkinan kenaikan itu bisa dibatalkan setelah pemerintah merunding ulang kebijakan TDL dengan DPR.

Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto menyatakan subsidi Rp10 triliun tidak terlalu sulit untuk dicarikan alokasinya dalam APBN



**Biaya pokok penyediaan listrik PLN vs BPK**

	PLN	BPK
BPP 2006	Rp98,1 triliun	Rp93,2 triliun
BPP rata-rata	Rp870,21/KWh	Rp832,88/KWh
Penjualan	112,8 juta MWh	111,9 MWh
Defisit	Rp38 triliun	Rp27,2 triliun
Subsidi pemerintah	Rp17 triliun	Rp17 triliun
Kekurangan subsidi	Rp21 triliun	Rp10,2 triliun

Sumber: BPK

2006. Dia optimistis TDL tidak perlu naik sebab DPR sudah menyetujui untuk memberikan tambahan subsidi jika hanya Rp10 triliun.

Sebelumnya, pemerintah mengajukan empat skenario kenaikan TDL dengan kisaran 15%-20% dengan asumsi yang tidak jauh berbeda dengan hasil perhitungan BPK.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku belum menerima hasil audit PLN. Ini karena laporan BPK diberikan kepada DPR. Tembusan surat hasil audit itu akan dikirimkan kemudian kepada Menkeu dan Menneg ESDM.

Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Wimpi Kamanjaya mengemukakan, setelah hasil audit diterima masing-masing instansi terkait, diperkirakan 1-2 minggu kemudian baru dibahas.

Sedang Menko Perekonomian Boediono mengatakan akan memasukkan hasil audit BPK ke dalam pembahasan tim teknis. (06/07) (dwi.djanuarto@bisnis.co.id)

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : /

TAHUN 2006

**DPR MINTA TDL TAK NAIK**

# BPK: Biaya Pokok Listrik Kemahalan Rp 4,9 Triliun

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan mengoreksi biaya pokok penyediaan (BPP) listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). BPK menilai BPP listrik PLN kemahalan Rp 4,9 triliun. Sedangkan defisit PLN menurut BPK hanya Rp 27,2 triliun, lebih rendah Rp 7,5 triliun dari perhitungan PLN sebesar Rp 34,7 triliun.

Demikian hasil audit BPP Listrik oleh BPK yang diserahkan Ketua BPK Anwar Nasution kepada Ketua DPR Agung Laksono di Gedung DPR Jakarta, Kamis (9/3).

Sementara itu, DPR akan berjuang agar TDL tidak naik tahun ini. Sebab, dengan defisit PLN sebesar Rp 27,2 triliun, pemerintah cukup menambah subsidi Rp 10,2 triliun, karena PLN sudah mendapat subsidi tahap pertama sebesar Rp 17 triliun untuk tahun 2006.

Dalam laporan auditnya, Anwar Nasution menjelaskan, BPP tahun 2006 mencapai Rp 93,2 triliun atau Rp 832,88 per kWh. Ini berbeda dengan perhitungan PLN sebesar Rp 98,1 triliun atau Rp 870,2 per kWh. Dengan demikian, terdapat selisih perhitungan BPP sebesar Rp 4,9 triliun.

Selisih tersebut meliputi biaya bahan bakar sebesar Rp 3,6 triliun, serta Rp 1,3 triliun yang terdiri atas biaya listrik swasta, penyusutan, kepegawaian, pemeliharaan, administrasi, dan biaya pinjaman.

"Koreksi biaya bahan bakar itu disebabkan oleh penurunan volume penjualan tenaga listrik dari 112.000 GWh menjadi 111.000 GWh," kata Anwar.

Menurut BPK, sekitar 87% BPP atau Rp 81,1 triliun adalah biaya pembangkitan. Sedang bagian terbesar biaya pembangkitan berasal dari biaya bahan bakar sebesar Rp 51,6 triliun atau 55,3% keseluruhan biaya.

Dia memaparkan, BPP rata-rata temuan BPK adalah Rp 832,88 per kWh yang terdiri atas BPP tegangan tinggi Rp 606,18 per kWh, BPP tegangan menengah Rp 750,44 per kWh dan BPP tegangan rendah Rp 926,7 per kWh. BPP rata-rata Rp 832,88 per kWh itu merupakan harga jual untuk seluruh golongan tarif pelanggan.

Dengan perhitungan itu, defisit PLN terkoreksi hingga Rp 7 triliun menjadi Rp 27,2 triliun. Defisit itu merupakan selisih antara BPP Rp 93,2 triliun dan penjualan listrik PLN Rp 66 triliun.

Perhitungan BPP versi BPK ini menggunakan asumsi kurs Rp 9.700 per dolar AS, inflasi lokal 8%, harga solar Rp 5.000 per liter.

Anwar Nasution menambahkan, setiap kenaikan 1% volume penjualan tenaga listrik akan menambah kerugian PLN sebesar Rp 227,47 miliar. Sedangkan setiap kenaikan 1% susut tenaga listrik akan menambah BPP Rp 557,31 miliar.

Selain itu, setiap kenaikan kurs Rp 100 per dolar AS akan menambah BPP sebesar Rp 210,4 miliar dan setiap kenaikan harga solar Rp 100 akan menambah BPP Rp 642,8 miliar.

Juru bicara PLN Muljo Adji mengatakan, koreksi BPP oleh BPK terjadi karena adanya penurunan volume penjualan listrik. Pihaknya mendukung jika pemerintah bersedia menomboki kekurangan subsidi Rp 10 triliun sehingga TDL tak perlu naik. "Kita tinggal melaksanakan. Tapi kalau pemerintah tidak berniat menambah subsidi,

sementara kenaikan tarif tidak dilakukan, ya kami akan bilang ke pemerintah bahwa kami tahun ini tekor Rp 10 triliun," katanya.

Konsekuensinya, pelanggan Jawa-Bali harus rela mengurangi pemakaian listrik hingga setara Rp 10 triliun atau PLN pada akhirnya tidak mampu memenuhi kebutuhan pasokan listrik.

Deputi Direktur Pembangkitan dan Energi Primer Tonny Agus Mulyantono menambahkan, perbedaan BPP hingga Rp 4,9 triliun terjadi antara lain karena perbedaan asumsi harga solar. "PLN menggunakan asumsi harga BBM Rp 6.000 per liter, sedangkan BPK menggunakan asumsi Rp 5.000 per liter," katanya.

**Tak Perlu Naik**

Di tempat terpisah, Menko Perencanaan Boediono menegaskan bahwa BPP listrik hasil audit BPK ini akan dijadikan patokan pemerintah untuk menaikkan TDL.

"Pemerintah harus menghitung kembali atas dasar BPP yang seka-

rang sudah lebih baku dari BPK," kata Boediono, kemarin.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan, hasil audit itu akan segera dipelajari untuk memutuskan apakah pemerintah perlu menaikkan TDL atau tidak. "Saya belum terima laporan BPK. Nanti, kita akan pelajari segala kemungkinannya," ujarnya.

Senada dengan Sri Mulyani, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan TDL bisa saja tidak naik asalkan pemerintah bersedia menambah subsidi untuk PLN. "Wacana itu sudah berkembang di DPR," katanya.

Dia menilai, koreksi BPP itu menunjukkan beban pemerintah sudah berkurang. "Efisiensi itu jelas mengurangi porsi subsidi. Artinya tarif bisa ditekan karena subsidi berkurang," katanya.

Walau begitu, Paskah belum bisa menyebut pilihan mana kelak yang akan diambil. "Nanti dulu *deh* karena ada juga wacana dengan DPR

agar ditambah lagi besaran subsidi dalam APBN sehingga tak membebani rakyat. Namun, kalau pun harus dinaikkan tak perlu sebesar simulasi yang pernah kami buat," katanya.

Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, hasil audit BPK akan dijadikan bahan utama bagi pemerintah maupun DPR untuk menetapkan TDL 2006. "Sesuai ketentuan internal DPR, bahan ini akan diserahkan kepada Komisi VII DPR RI untuk dilakukan pendalaman dan pembahasan bersama pemerintah," katanya.

Sementara itu, Komisi VII DPR akan memulai pembahasan TDL 2006 dengan tim teknis pemerintah pekan depan. Menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoenaga dan anggota Komisi VII Dito Ganinduto, pihaknya akan memperjuangkan agar TDL tidak naik selama 2006.

Dito menekankan, kekurangan subsidi 10 triliun masih bisa ditutup dari sisa anggaran tahun sebelumnya. "Kalau hanya untuk Rp 10

triliun, tampaknya APBN kita masih mampu, sehingga TDL tidak perlu naik," katanya.

Dalam pembahasan TDL dengan pemerintah nanti, kata Sutan, Komisi VII akan minta agar BPP PLN bisa ditekan lagi, misalkan dari pengurangan tunggakan listrik yang jumlahnya cukup besar," ujar Sutan.

Selain itu, BPP listrik juga bisa dipangkas dengan mengurangi susut tenaga listrik, menekan harga BBM, dan menambah subsidi listrik di APBN 2006. Apalagi, lanjutnya, berdasarkan audit BPK masih terdapat potensi penghematan BPP hingga mencapai Rp 12,1 triliun.

BPK mencatat, PLN memiliki 10 pembangkit listrik dual firing (bisa menggunakan BBM atau gas) di Jawa-Bali dengan daya 3.301 MW. Apabila 10 pembangkit yang menghasilkan 11,4 juta MWh atau 11,9% keseluruhan produksi listrik PLN bisa mendapatkan pasokan gas, PLN bisa menghemat Rp 12,1 triliun. (ari/c85/c84)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA-
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- REALITAS

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB **MAR** APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7 .

TAHUN 2006

## Diperlukan UU Kelistrikan Serasi dengan Lingkungan

### Denpasar, Realitas

Pemerintah perlu membuat draf rancangan undang-undang (RUU) ketenagalistrikan yang serasi dengan kondisi lingkungan supaya bisa menghindari benturan di masyarakat.

"Penyediaan tenaga listrik saat ini sering terjadi benturan dengan masyarakat karena dikaitkan dengan masalah lingkungan," kata General manajer PLN Distribusi Bali, Ngurah Adnyana, di Denpasar, Selasa.

Ia mengungkapkan pengalamannya itu di hadapan Panitia Ad Hoc (PAH) II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang saat ini berada di Bali dalam rangka mendapatkan masukan untuk bahan pembuatan sejumlah RUU.

PAH II DPD dengan kordinator Ida Ayu Agung Mas, melakukan dengar pendapat umum yang dipimpin Sekprop Bali Nyoman Yasa, dalam rangkaian penyusunan RUU Penanaman Modal, RUU Penanggulangan Bencana Alam dan RUU Ketenagalistrikan.

Pengadaan tenaga listrik PLN belakangan ini sering berben-

turan terhadap masalah lingkungan sehingga muncul berbagai permasalahan, seperti halnya proyek pembangkit tenaga listrik panas bumi di kawasan wisata Bedugul.

Bali merencanakan membangun pembangkit tenaga listrik menggunakan batubara dalam upaya memenuhi keperluan masyarakat untuk jangka menengah, namun mendapat pertentangan masyarakat akibat pencemaran lingkungan.

Untuk menghindari benturan dengan masyarakat dalam membangun pembangkit tenaga listrik di daerah, maka perlu adanya payung hukum yang terkait dengan lingkungan sehingga tidak terjadi benturan dengan masyarakat.

PLN distribusi Bali untuk sementara menunda pengembangan baru, katanya sambil menyebutkan bahwa krisis listrik di Bali sudah tidak ada lagi, karena sebagian besar kebutuhan listrik dipasok dari distribusi Jawa-Bali.

Dari semua pembangkit yang ada di Bali ditambah pasokan dari

Jawa, maka jumlah daya mampu yang ada sekarang sebesar 570 MW, sedangkan beban puncak pada 400 MW, sehingga masalah aliran listrik di Bali saat ini tidak masalah, katanya.

PLN tetap berupaya untuk membangun pembangkit baru untuk mengantisipasi permintaan masyarakat konsumen di daerah Bali yang selama ini banyak bermunculan sarana akomodasi perhotelan dan restoran bagi kebutuhan turis.

Adnyana mengatakan, pembangunan pembangkit listrik baru kemungkinan di kawasan pelabuhan laut Celukan Bawang, Buleleng, 100 Km utara Denpasar, dengan jenis pembangkit listrik tenaga batu bara dan pembangunan itu sudah diwacanakan.

Di Kawasan wisata Nusa pemida juga akan dibangun pembangkit listrik tenaga disel untuk memenuhi permintaan masyarakat setempat, sebab di pulau yang terpisah dengan daratan Bali itu berpotensi untuk pengembangan pariwisata.

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB **MAR** APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 7.6.

TAHUN 2006



BISNISYAYUS YUSWOPRIHANTO

**KEBUTUHAN LISTRIK:** Lampu-lampu gedung perkantoran di kawasan pusat bisnis Jl. Sudirman Jakarta mulai menyala menjelang terbenamnya matahari, pekan lalu. Pertumbuhan permintaan listrik terus meningkat baik rumah tangga, bisnis dan industri. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan

tentang biaya pokok penyediaan (BPP) listrik PT PLN menunjukkan kenaikan tarif dasar listrik tidak perlu lebih dari 15% karena masih banyak hal yang perlu diefisienkan.

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN			FEB			MAR			APR			MEI			JUN			JUL			AGST			SEPT			OKT			NOV			DES		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					

HALAMAN : 2.

TAHUN 2006

### Kontraktor PLTU Ingkari Perbaikan Jalan

**CILACAP** - Dinas Bina Marga Cilacap menuding kontraktor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cilacap ingkar janji. Secara sepihak kontraktor membatalkan nota kesepahaman untuk perbaikan jalan provinsi yang rusak akibat dilalui kendaraan pengangkut material untuk proyek raksasa senilai Rp 5 triliun. Kepala Balai Pelaksana Teknis Bina Marga wilayah Cilacap, Ir. Priyono kepada "PR", Kamis (9/3), mengatakan, kontraktor telah membatalkan perjanjian pemeliharaan dan perbaikan jalan provinsi sepanjang 7 km. Dinas Bina Marga dan kontraktor PLTU mengadakan MOU perbaikan jalan provinsi, sebagai kompensasi kerusakan jalan akibat pengangkutan material melampaui batas tonase. (A-99)\*\*\*

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA			<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																											
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI		<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																										
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 4											TAHUN 2006																			

# BPK Koreksi PLN Rp 4,9 Triliun

## Hasil Audit Ini Dijadikan Bahan Penetapan TDL

JAKARTA, (PR).-

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap biaya pokok produksi (BPP) penyediaan tenaga listrik, menemukan adanya selisih Rp 4,9 triliun dari anggaran BPP semula yang diajukan PLN sebesar Rp 98,13 triliun.

"BPK telah melakukan koreksi terhadap BPP sebesar Rp 4,9 triliun. Sehingga BPP yang semula dihitung oleh PLN sebesar Rp 98,13 triliun bisa diturunkan menjadi Rp 93,23 triliun," kata Ketua BPK Anwar Nasution dalam jumpa pers usai menyerahkan hasil audit BPP kepada pimpinan DPR di Gedung DPR/MPR Jln. Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (9/3).

Koreksi ini terdiri dari Rp 3,6 triliun atau 73% merupakan koreksi kurangnya biaya bahan bakar. Koreksi bahan bakar ter-

jadi karena menurunnya volume penjualan tenaga listrik sehingga volume bahan bakar dapat diturunkan yang pada gilirannya dapat menurunkan biaya bahan bakar.

Koreksi kedua sebesar 27% atau Rp 1,3 triliun terdiri dari koreksi biaya listrik swasta, penyusutan kepegawaian, kendaraan, biaya administrasi dan pinjaman. BPP rata-rata atas temuan BPK adalah Rp 832,88 per kWh yang terdiri dari BPP tegangan tinggi Rp 606,18 per kWh, BPP tegangan menengah Rp 750,44 per kWh dan BPP tegangan rendah Rp 926,7 per kWh.

BPP rata-rata yang sebesar Rp 832,88 per kWh itu, harga jual untuk seluruh golongan tarif pelanggan. "Sehingga PLN akan mengalami defisit sebesar Rp 27,2 triliun. Defisit

itu berasal dari selisih antara BPP sebesar Rp 93,2 triliun dengan pendapatan PLN dari penjualan listrik sebesar Rp 66 triliun," ujar Anwar.

BPK pun menemukan anggaran penjualan tenaga listrik untuk tahun 2006 lebih tinggi dari angka rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) sebesar 831.435 MWh. Angka anggaran penjualan yang diajukan didasarkan atas pembahasan antara PLN dengan Departemen ESDM.

Pemeriksaan BPK tidak menemukan dokumen bukti pendukung yang merinci hitungan itu. Oleh karenanya BPK mengembalikan pada angka anggaran awal sesuai dengan RKAP tahun 2006 yang telah disetujui oleh RUPS yaitu sebesar 111,99 juta MWh yang merupakan koreksi ku-

rang sebesar 831.435 MWh dari 112,88 juta MWh.

Bagian terbesar dari BPP adalah untuk biaya pembangkitan yang sebesar Rp 81,1 triliun atau 87% dari keseluruhan biaya. Sementara, bagian terbesar dari biaya pembangkitan diperlukan untuk biaya bahan bakar sebesar Rp 51,6 triliun atau 55,3% dari keseluruhan biaya.

Angka BPP rata-rata yang sebesar 832,88 MWh itu dihitung dengan asumsi kurs Rp 9.700 per 1 dolar AS, inflasi 8% dan harga BBM jenis solar Rp 5.000 per liternya. Di samping pengurangan total BPP angka asumsi akan mempengaruhi BPP secara keseluruhan.

Perhitungan sensitivitas memperhitungkan setiap kenaikan 1% volume penjualan tenaga listrik akan menambah

kerugian PT PLN sebesar Rp 227,47 miliar. Tiap kenaikan 1% susut tenaga listrik akan menambah BPP sebesar Rp 557,31 miliar.

Tiap kenaikan kurs dolar AS sebesar Rp 100 akan menambah BPP sebesar Rp 210,40 miliar. Lalu, tiap kenaikan harga BBM solar Rp 100 akan menambah BPP sebesar Rp 642,8 miliar.

Ketua DPR Agung Laksono menyatakan, temuan BPK ini akan ditindaklanjuti dengan komisi yang terkait yakni Komisi VII. "Nanti pada saatnya akan diadakan pembahasan dengan Meneg BUMN dan Menteri ESDM," ujarnya. "Soal berapa besar kenaikan TDL, tentunya akan dilakukan pembahasan dulu dengan pemerintah," jelasnya. (A-109/A-130)\*\*\*

7

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 17

TAHUN 2006

# Hasil Audit BPP Lebih Rendah

## Subsidi Listrik Ditekan Jadi Rp 27,2 Triliun

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengoreksi biaya pokok penyediaan atau BPP listrik PT Perusahaan Listrik Negara dari Rp 98,1 triliun menjadi Rp 93,2 triliun, atau lebih rendah Rp 4,9 triliun. Dengan pengurangan angka BPP tersebut, subsidi listrik 2006 masih bisa ditekan menjadi Rp 27,2 triliun.

Ketua BPK Anwar Nasution mengungkapkan hal tersebut sesuai menyerahkan laporan resmi hasil audit BPP listrik kepada Ketua DPR Agung Laksono, Kamis (9/3) di Gedung DPR.

BPP diaudit BPK berdasarkan permintaan DPR awal Februari lalu karena BPP yang diajukan oleh PLN dinilai tidak wajar. DPR meminta hasil audit menjadi dasar perlu tidaknya menaikkan tarif dasar listrik (TDL).

Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian anggaran BPP dengan asumsi yang disepakati dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PLN. Koreksi dilakukan dengan membandingkan antara angka BPP yang disampaikan Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi dan direksi PLN dalam rapat dengan pendapat pertama pembahasan alternatif subsidi listrik dan kenaikan TDL dengan DPR pada 23 Januari 2006. Dalam rapat itu disebutkan, PLN membutuhkan anggaran BPP Rp 98,1 triliun untuk menghasilkan daya listrik sebanyak 112,8 juta megawatt hour (MWh).

Anwar mengatakan, BPK menemukan anggaran penjualan tenaga listrik yang disampaikan pemerintah dan PLN lebih tinggi dari angka RKAP PLN. Dalam RKAP 2006, asumsi volume listrik yang akan dihasilkan sebesar 111,9 juta MWh dengan anggaran

BPP Rp 93,2 triliun. BPK menilai angka versi pemerintah yang disampaikan dalam rapat tidak bisa digunakan karena tidak ada dokumen pendukung yang merinci penghitungan tersebut. Atas dasar itu, BPK mengembalikan angka BPP kepada anggaran yang ditetapkan dalam RKAP PLN.

Pengurangan Rp 4,9 triliun itu terutama bersumber dari biaya bahan bakar Rp 3,6 triliun (73 persen), sedangkan Rp 1,3 triliun merupakan koreksi biaya listrik swasta, penyusutan, kendaraan, administrasi dan pinjaman. Dengan volume penjualan tenaga listrik yang lebih rendah, biaya bahan bakar pun bisa ditekan. BPK menggunakan asumsi harga solar Rp 5.000 per liter.

Perbedaan volume penyediaan tenaga listrik dan BPP tersebut mengakibatkan perubahan BPP rata-rata rupiah per kWh. BPP rata per kWh menurut PLN adalah Rp 870,21. BPP tersebut terdiri atas BPP tegangan tinggi (TT) Rp 600,34 per kWh, BPP tegangan menengah (TM) Rp 729,04 per kWh, BPP tegangan rendah (TR) Rp 1.009,05 per kWh.

Adapun menurut penghitungan BPK, BPP rata-rata adalah Rp 832,88 per kWh, BPP TT Rp 606,18 kWh, BPP TM Rp 752,44 per kWh, BPP TR Rp 926,07 per kWh. Koordinator Working Group on Powering Sector (WGPSR) Fabby Tumiwa menilai

hasil audit BPP yang menggunakan metoda komparasi di atas kertas itu tidak valid.

"Toh angka yang disampaikan pemerintah asalnya juga dari PLN. Audit harusnya bisa menunjukkan angka BPP yang disampaikan PLN itu datangnya dari mana. Seharusnya BPK mengecek efisiensi biaya produksi per jenis pembangkit," ujar Fabby.

### Bisa tidak naik

Dengan koreksi BPP menjadi Rp 93,2 triliun dan asumsi pendapatan PLN tahun 2006 sebesar Rp 66 triliun, masih terdapat selisih sebesar Rp 27,2 triliun. Selisih itu lebih kecil dari yang pernah disampaikan, yaitu Rp 34 triliun. Dengan alokasi subsidi yang sudah pasti disediakan pemerintah sebesar Rp 17 triliun, masih ada kekurangan sekitar Rp 10 triliun.

Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, pimpinan DPR menyerahkan kelanjutan hasil audit BPP tersebut kepada Komisi VII yang akan memberikan konfirmasi pernyataan apakah akan ada kenaikan TDL atau tidak. "Nanti akan dilakukan pendalaman oleh DPR dengan pemerintah," kata Agung.

Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas ~~Raskah~~ Suzetta mengatakan, dengan hasil audit BPP tersebut, kenaikan TDL bisa lebih rendah dari angka perkiraan pemerintah, yakni 15-20 persen. Jika kebutuhan subsidi PLN sekarang sekitar Rp 20 triliun, nilai subsidi bisa diturunkan. Atau, bisa ada kenaikan TDL, namun tidak setinggi simulasi pemerintah saat ini. Juga terbuka peluang tidak perlu naik. (DOT/OIN)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE:  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: /

TAHUN 2006

## AUDIT BPK SELESAI

# Tarif Listrik Tak Perlu Naik

"Rakyat masih mengalami tekanan berat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak."

JAKARTA — Pemerintah tidak perlu menaikkan tarif dasar listrik pada tahun ini. Alasannya, tambahan subsidi listrik yang hanya Rp 10,2 triliun pasti bisa ditutup pemerintah. "Jadi tarif listrik tak perlu naik," kata anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Catur Sapto Edi, kepada *Tempo* di Jakarta kemarin.

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional ini menanggapi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas biaya pokok produksi listrik PLN yang disampaikan kepada DPR kemarin. BPK menyimpulkan, defisit keuangan PLN berjumlah Rp 27,2 triliun, jadi lebih rendah dari perhitungan PLN—Rp 38,5 triliun. Subsidi listrik di APBN 2006 adalah Rp 17 triliun. Sehingga pemerintah hanya perlu menambah Rp 10,2

triliun (lihat tabel).

Menurut Catur, tambahan subsidi itu bisa diambil dari sisa anggaran 2005 senilai Rp 56 triliun. PLN juga punya sisa subsidi 2005 sebesar Rp 4 triliun. "Tarif listrik tidak harus naik karena rakyat masih mengalami tekanan berat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak."

Ketua BPK Anwar Nasution menegaskan, ada koreksi biaya pokok PLN dari Rp 98,1 triliun menjadi Rp 93,2 triliun. Selisih Rp 4,9 triliun itu berasal dari pe-

ngurangan biaya bahan bakar Rp 3,6 triliun serta koreksi biaya listrik swasta, penyusutan biaya kepegawaian, dan beberapa pos lain. Walhasil, dengan pendapatan PLN Rp 66 triliun, defisit PLN tinggal Rp 27,2 triliun.

Pada awal Januari lalu, PLN meminta pemerintah menaikkan tarif dasar listrik. Alasannya, subsidi yang ada tak bisa lagi menutup kenaikan ongkos akibat kenaikan harga bahan bakar minyak dan perubahan nilai tukar rupiah atas dolar. Defisit—

versi PLN—Rp 38,5 triliun. Pemerintah menganggarkan subsidi Rp 17 triliun.

Dito Ganinduto, anggota Fraksi Partai Golkar, juga meminta tarif listrik tidak naik. Kalau naik, maksimal 15 persen. "Jika pemerintah menambah subsidi (untuk PLN) Rp 5 triliun, tarif listrik mungkin hanya naik 10 persen," katanya.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta menanggapi positif hasil audit BPK. Menurut Paskah, PLN mampu melakukan efisiensi. "Dampaknya, subsidi pemerintah bisa berkurang," katanya.

Paskah mengungkapkan, ada keinginan pemerintah untuk tidak membebani masyarakat. Artinya, subsidi akan ditambah: "Suasannya seperti itu (penambahan subsidi)."

Pekan lalu, pemerintah telah menyanggupi subsidi minimal Rp 7 triliun. Berpatokan pada hasil audit BPK, kekurangan defisit PLN tinggal Rp 3,2 triliun.

● AGUS SUPRIYANTO | ALI NY | RETNO | FASABENI

### Skenario Kenaikan Tarif Listrik

Solar (Rp/Liter)	BPP*	Pendapatan*	Subsidi*	Kenaikan (%)	Tambahan Subsidi*
4.500	94	66,3	30,5	0	13,5
5.000	98,1	66,3	34,7	0	17,7
5.000	98,1	75,5	25,5	15	8,5
5.000	98,1	78,5	22,5	20	5,5
5.000	93,2	66	27,2	0	10,2

\*) Rp Triliun \*\*) Versi BPK

Keterangan: BPP = biaya pokok pengadaan listrik

SUMBER: PEMERINTAH

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 6

TAHUN 2006

### Kerusakan Akibat Tegangan Naik, Diganti PLN

YOGYAKARTA (Suara Karya): PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjanjikan akan membayar ganti rugi kepada konsumen, jika merasa dirugikan akibat tegangan listrik melonjak, yang menimbulkan peralatan elektronik rumah tangga rusak.

"Jika benar kerusakan tersebut diakibatkan oleh PLN, maka akan saya tugaskan petugas PLN untuk membayar kerugian," kata Direktur Pelayanan dan pelanggan PT PLN Sunggu Anwar Aritonang dalam forum komunikasi teknis harmonisasi pelaksanaan perlindungan konsumen di Yogyakarta, Kamis (9/3).

Meski demikian, katanya, dalam memberikan kerugian PLN mengacu pada aturan yang ada. "Jangan ketika saat bayar-membayar, di situ ada gerbong-gerbong tambahan. Bisa menimbulkan KKN dan petugas kami kesulitan," katanya.

Dijelaskan, dalam kasus tegangan naik ini yang kerap terjadi akibat sambaran petir, dan biasanya konsumen langsung komplain menyalahkan PLN. "Kalau ada kasus-kasus seperti itu bicarakan saja kepada petugas-petugas PLN di lapangan, pasti diperhatikan," katanya (B Sugiharto)

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2006

## AUDIT LISTRIK

# BPK Temukan Selisih Rp 4,9 Triliun dari BPP

JAKARTA (Suara Karya). Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap biaya pokok produksi (BPP) penyediaan tenaga listrik ditemukan adanya selisih sebesar Rp 4,9 triliun dari anggaran BPP semula yang diajukan PLN sebesar Rp 98,13 triliun.



Anwar Nasution

"BPK telah melakukan koreksi kurang terhadap BPP sebesar Rp 4,9 triliun. Sehingga BPP yang semula dihitung oleh PLN sebesar Rp 98,13 triliun bisa diturunkan menjadi Rp 93,23 triliun," kata Ketua BPK

Anwar Nasution dalam jumpa pers usai menyerahkan hasil audit BPP kepada pimpinan DPR di Jakarta, Kamis (9/3).

Sebelumnya DPR memang meminta agar pemerintah melakukan audit terhadap BPP yang diajukan PLN sebelum menaikkan tarif dasar listrik (TDL).

Koreksi yang merupakan hasil temuan ini terdiri dari Rp 3,6 triliun atau 73 persen merupakan koreksi kurangnya biaya bahan bakar. Koreksi bahan bakar terjadi karena menurunnya volume penjualan tenaga listrik sehingga volume bahan bakar dapat diturunkan, yang pada gilirannya dapat menurunkan biaya bahan bakar.

Koreksi kedua sebesar 27 persen atau Rp 1,3 triliun terdiri dari koreksi biaya listrik swasta, penyusutan kepegawaian, kendaraan, biaya administrasi dan pinjaman.

BPP rata-rata atas temuan BPK adalah Rp 832,88 per kWh yang terdiri dari BPP tegangan tinggi Rp 606,18 per kWh, BPP tegangan menengah Rp 750,44 per kWh dan BPP tegangan rendah Rp 926,7 per kWh. BPP rata-rata yang sebesar Rp 832,88 per kWh itu, harga jual untuk seluruh golongan tarif pelanggan.

"Sehingga PLN akan mengalami defisit sebesar Rp 27,2 triliun. Defisit itu berasal dari selisih antara BPP sebesar Rp 93,2 triliun dengan pendapatan PLN dari penjualan listrik sebesar Rp 66 triliun," ujar Anwar.

BPK juga menemukan anggaran penjualan tenaga listrik untuk tahun 2006 lebih tinggi dari angka rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) sebesar 831.435 MWh sesuai dengan angka anggaran penjualan yang diajukan didasarkan atas pembahasan antara PLN dengan Departemen ESDM.

Karena pemeriksaan BPK tidak menemukan dokumen bukti pendukung yang merinci hitungan tersebut, maka BPK mengembalikan pada angka anggaran awal sesuai dengan RKAP tahun 2006 yang telah disetujui oleh RUPS yaitu sebesar 111,99 juta MWh yang merupakan koreksi kurang sebesar 831.435 MWh dari 112,88 juta MWh.

Bagian terbesar dari BPP adalah untuk biaya pembangkitan yang sebesar Rp 81,1 triliun atau 87 persen dari keseluruhan biaya. Sementara, bagian terbesar dari biaya pembangkitan diperlukan untuk biaya bahan bakar sebesar Rp 51,6 triliun atau 55,3 persen dari keseluruhan biaya.

Angka BPP rata-rata yang sebesar 832,88 MWh itu dihitung dengan asumsi kurs Rp 9.700 per 1 dolar AS, inflasi 8 persen dan harga BBM jenis solar Rp 5.000 per liter. Disamping pengurangan total BPP angka asumsi akan mempengaruhi BPP secara keseluruhan.

Perhitungan sensitivitas memperhitungkan setiap kenaikan 1 persen volume penjualan tenaga listrik akan menambah kerugian PT PLN sebesar Rp 227,47 miliar. Tiap kenaikan 1 per-

sen susut tenaga listrik akan menambah BPP sebesar Rp 557,31 miliar.

Tiap kenaikan kurs dolar AS sebesar Rp 100 akan menambah BPP sebesar Rp 210,40 miliar. Lalu, tiap kenaikan harga BBM solar Rp 100 akan menambah BPP sebesar Rp 642,8 miliar.

Anwar menegaskan, bahwa pemeriksaan BPK tentang BPP ini tidak menyangkut kebijakan penetapan tarif dasar listrik (TDL) dan kebijakan subsidi listrik yang menjadi kewenangan pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR RI. "Tuga kita hanya mengaudit saja," katanya.

Ketua DPR Agung Laksono menyatakan, temuan BPK ini akan ditindaklanjuti dengan komisi yang terkait yakni Komisi VII. "Nanti pada saatnya akan diadakan pembahasan dengan Meneg BUMN dan Menteri ESDM. Soal berapa besar kenaikan TDL, tentunya akan dilakukan pembahasan dulu dengan pemerintah," jelasnya.

Sementara Anggota komisi VII DPR RI, Dito Ganinduto mengatakan komisi VII akan segera membahas hasil temuan ini bersama dengan pemerintah dan PLN agar dapat segera diputuskan seberapa besar kenaikan TDL. Menurut dia, nantinya kenaikan TDL sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam memberikan subsidi. "Dalam hitungan sementara, kemungkinan pemerintah akan mampu menutupi kekurangan sehingga tidak perlu ada kenaikan," katanya.

Terkait hasil audit itu Menko Perekonomian Boediono menolak berkomentar. Pihaknya masih akan mengkaji serta meminta tim teknis yang terkait untuk memasukkan fakta-faktanya. Sementara Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengaku belum menerima hasil audit itu. "Segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi akan kita pelajari," kata Sri Mulyani. (Rully/Tri H)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB **MAR** APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 **(10)** 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7.

TAHUN 2006

## TDL bisa 'dijinakkan'

**K**ontroversi soal rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) mulai memasuki babak akhir. Bahkan bisa dibalang TDL tidak perlu dinaikkan.

Bagaimana bisa? Coba cermati Laporan Audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Biaya Penyediaan Listrik (BPP) PT PLN (Persero) yang dirilis di DPR, kemarin.

Defisit BUMN kelistrikan yang semula dijadikan 'bumper' terhadap kenaikan TDL, ternyata tidak sebesar yang diduga. Dari temuan BPK, defisit PLN bukan sebesar Rp23 triliun sebagaimana asumsi awal, melainkan 'cuma' Rp10,2 triliun. Dan yang terpenting adalah dari sederetan angka-angka yang disampaikan BPK itu, bahwa anggaran BPP perusahaan tersebut lebih tinggi Rp4,9 triliun.

Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2006, BPP diusulkan Rp98,1 triliun. Namun, dari hasil audit BPP juga tidak sebesar pengajuan karena hanya mencapai Rp93,2 triliun.

Apa makna dari temuan BPK tersebut? Alasan untuk menaikkan TDL tampaknya semakin sulit diterima.

Bukan sekali ini saja PLN mengadakan audit dalam upaya memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat. Audit khusus atas biaya pokok penjualan yang diumumkan kemarin—yang dilakukan atas permintaan DPR sebagai bahan utama membahas rencana kenaikan TDL dengan pemerintah—paling tidak melegakan. Ini ka-

rena hal tersebut kembali membuka mata publik bahwa, lagi-lagi, kegiatan operasi PLN belum efisien.

Di tengah kondisi tersebut, laju permintaan listrik per tahun sekitar 14%, sedangkan perusahaan itu hanya mampu memenuhi 9%. Nah, untuk membangun jaringan pembangkit baru jelas membutuhkan dana besar. Belum lagi biaya bahan bakar minyak (BBM), yang merupakan salah satu komponen pembangkit listrik, terus membengkak. Jadi, pemerintah tidak mempunyai pilihan lain kecuali melibatkan partisipasi swasta dalam pengadaan pembangkit tenaga listrik.

Kondisi yang tengah dihadapi PLN itu tentu bisa dipahami. Tetapi semua ongkos dan risiko BUMN itu dalam berbisnis *toh* tidak bisa ditimpakan semuanya begitu saja kepada konsumen, terutama pelanggan rumah tangga yang umumnya menggunakan daya 1.300-10.000 VA.

Optimisme bahwa TDL tidak perlu dinaikkan semakin menguat setelah Meneg PPN/Kepala Bappenas Pasrah Suzetta secara cukup gamblang menyatakan bahwa PLN masih bisa meningkatkan efisiensi lebih dari Rp4 triliun. Alhasil, menurut dia, pemerintah tidak perlu menaikkan TDL seharga yang sebagaimana disimulasikan.

Lapangan Banteng juga memberikan harapan baru setelah terbetik kabar bahwa Menkeu Sri Mulyani Indrawati tengah mempelajari kemungkinan penambahan subsidi untuk menutupi selisih kekurangan biaya penye-

diaan listrik.

Berbicara soal efisiensi di tubuh PLN, sebenarnya masih banyak hal yang bisa dilakukan BUMN kelistrikan itu. Kalau kredo efisiensi demi kepuasan pelanggan ini benar-benar dicamkan PLN, anggaran negara yang bisa dihemat semakin besar.

Sebagai gambaran, pemerintah memberikan subsidi Rp15 triliun kepada perusahaan setrum plat merah itu dalam APBN 2006, meski persetujuan yang diberikan DPR sebenarnya lebih besar, yaitu Rp17 triliun.

Pemerintah seharusnya paham bahwa kenaikan TDL bakal mendorong laju inflasi. Gerak operasi industri otomatis semakin mahal. Ujung-ujungnya harga barang, termasuk barang kebutuhan rumah tangga, ikut meroket.

Ini merupakan efek domino yang tidak kita inginkan. Bahkan Mennakertrans Erman Soeparno pernah mengingatkan kenaikan TDL, bahkan kalau sampai 100%, bisa memicu pertambahan pengangguran 2%.

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : /

TAHUN 2006

# Pergantian Direksi Jangan Loloskan ExxonMobil

Jakarta- Pergantian direksi Pertamina jangan sampai menjadi alasan memuluskan langkah ExxonMobil menjadi operator Blok Cepu.

Oleh  
**SIGIT WIBOWO**

Bila pemerintah membiarkan ExxonMobil sebagai operator Blok Cepu, ini akan menyimpan bom waktu karena eksploitasi asing seperti kasus Freeport akan terjadi lagi.

"Apapun alasannya operator Blok Cepu harus dipegang oleh Pertamina," kata anggota Komisi VI DPR, Zulkiflimansyah, kepada SH di Jakarta, Kamis (9/3).

Dia mengatakan jika operator Blok Cepu adalah Pertamina akan memberikan manfaat besar bagi perekonomian nasional, tetapi sebaliknya jika yang menjadi operator ExxonMobil, justru menimbulkan kerugian bagi generasi penerus. "Fraksi PKS secara bulat mendukung Pertamina menjadi operator Blok Cepu," ujarnya.

Ia menyatakan terlepas banyaknya ketidakbebasan di Pertamina, tetapi penting-

an ekonomi nasional tetap harus menjadi prioritas. Zulkiflimansyah mendesak pemerintah agar tidak terlalu mengutamakan kepentingan-kepentingan sempit dan sesaat yang hanya menguntungkan segelintir orang.

Sementara itu, Meneg BUMN Sugiharto mengatakan Pemerintah akan mengembalikan negosiasi pengelolaan Blok Cepu kepada Pertamina. Pertamina yang harus melakukan negosiasi dengan Exxon mobil secara *business to business*.

"Kami akan melihat bagaimana direksi baru merealisasikan perjanjian pengoperasian seperti yang tertuang dalam kontak kerja sama (KKS) pada September 2005," ujar Sugiharto, Rabu (8/3) malam.

Direktur Utama PT Pertamina Ari Soemarno menyatakan siap melanjutkan negosiasi dengan ExxonMobil.

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE:  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB **MAR** APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: / 4

TAHUN 2006

## Peringatan Hari Perempuan Internasional

# 1.000 Buruh di Bandung Tolak Kenaikan TDL

BANDUNG - Sedikitnya 1.000 buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat berunjuk rasa menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik (TDL) di depan Gedung Sate, Bandung, Rabu (8/3). Selain itu para buruh juga menolak amandemen Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dinilai sangat merugikan buruh atau pekerja.

Dalam aksinya, para buruh yang datang dari Kota dan Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi ini sempat berusaha mendorong pagar pintu Gedung Sate serta melempar botol air mineral ke arah petugas pengamanan.

"Kami dengan tegas menolak kenaikan TDL, karena itu dapat berimbas pada para karyawan. Kami juga meminta agar Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor B-600/men/Sj-HK/VIII/2005 tentang uang penggantian perumahan segera dicabut. Itu melanggar norma kerja," ujar Sukarna Bratakusumah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KSPSI Kota Bandung.

Selain itu, buruh juga meminta agar Peraturan Menteri Nomor 17/Men/VI-II/2005 tentang komponen pelaksanaan Kebutuhan Hidup Layak direvisi. Pasalnya, aturan itu sudah tidak diperlukan

lagi dalam penetapan pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Dalam amandemen UU No 13/2003 tentang ketenagakerjaan, tercantum 12 poin perubahan yang dianggap merugikan para pekerja.

Di antaranya adalah peraturan yang menghilangkan hak cuti, pengurangan paket pesangon bagi pekerja dari 9 kali gaji menjadi 7 kali gaji, pengekangan hak mogok kerja akibat adanya sanksi pemutusan hubungan kerja dan ganti rugi, pesangon yang tidak akan dibayarkan kepada pekerja apabila perusahaan mengalami *force major*, serta penghilangan sistem uang pensiun. "Itu semua sangat merugikan kami," tegas Sukarna.

### Demo Perempuan

Pada kesempatan yang sama, sekitar 20 perempuan dari Komite Perempuan Nasional Serikat Pekerja Mandiri juga melakukan aksi unjuk rasa yang meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 183 tentang Maternity Protection.

Dalam konvensi tersebut dijelaskan hak pekerja perempuan saat mereka hamil selama 3,5 bulan seharusnya mendapatkan pembayaran gaji secara penuh.

"Tapi, dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan kita hanya diberi cuti tanpa ada gaji sama sekali," jelas Ketua Komite Perempuan Nasional Serikat Pekerja Mandiri, Yanti Prianti.

Selama ini, tambahnya, pengusaha di Indonesia selalu mengacu pada UU ketenagakerjaan tersebut. "Hal ini diperburuk dengan sedikitnya perempuan yang mengetahui hak mereka dalam bekerja," ujarnya.

Untuk itu, Yanti menuntut agar pemerintah dapat memberikan jaminan bahwa tidak seorang pun pekerja perempuan tidak boleh di-PHK karena alasan hamil dan melahirkan anaknya. "Kami juga menuntut agar diberikan 16 minggu cuti melahirkan bukan seperti selama ini yang hanya 14 hari setelah cuti melahirkan dilaksanakan, adanya jaminan upah bagi ibu cuti selama melahirkan serta fasilitas menyusui selama jam kerja," tandasnya.

Aksi yang dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional ini merunut pada kejadian di Petrograd, Rusia 89 tahun silam. Pada saat itu, para perempuan melakukan pemogokan nasional di Rusia guna menuntut pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat dan menghentikan perang dunia. (ADI/W-8)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE:  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: /

TAHUN 2006

# Revealing BPK audit may slash power rate hike

The Jakarta Post  
Jakarta

The Supreme Audit Agency (BPK) has found the actual cost for electricity generation for this year will be 4.3 percent lower than state power firm PT PLN's projection, sparking hope that a planned rate hike will be minimal or scrapped altogether.

It revised down costs by Rp 4.9 trillion (US\$524 million) to Rp 93.23 trillion, or Rp 833 per kiloWatt-hour (kWh), agency chief Anwar Nasution told reporters after submitting the audit report to the House of Representatives on Thursday.

PLN previously estimated the average cost to generate one kWh of power at Rp 870.

According to the BPK findings, the state firm will need additional income of Rp 27.2 trillion to secure its operations without an increase in the power rate. The government has earmarked Rp 17 trillion of subvention for electricity this year, leaving a deficit of Rp 10.2 trillion.

State Minister of National Development Planning Paskah Suzetta said that with the lower deficit, the planned power rate hike may be minimized.

"We may not need to raise the rate altogether," he said.

In its audit that began on Feb. 7 at the request of the House, the BPK found the power company calculated 111.9 TeraWatt-hour (TWh)

as the amount of power to be sold in its annual work and budget plan, but used sales volume of 112.8 TWh in simulations to determine the power rate hike.

Head of the audit team Hasbi Ashidiqi said the BPK used the figures because the work plan was approved by the government in the general shareholders meeting and there was no valid explanation for the higher volume.

"With lower sales volume, the amount of high speed diesel to be used (to generate power) is automatically slashed," said Hasbi.

With an assumed rupiah rate of 9,700 to the U.S. dollar, inflation of 8 percent and high speed diesel price of Rp 5,000 per liter, the team calculated that PLN would spend Rp 51.57 trillion for all kinds of fuel, lower than the firm's estimate of Rp 55.17 trillion.

Reduced costs also occurred for estimates of power bought from independent power producers, depreciation, maintenance and lending costs, amounting to Rp 1.3 trillion in total.

House Speaker Agung Laksono said that the legislators would discuss the audit results with the government, expected to start next week.

The BPK also found PLN could have saved Rp 12.15 trillion in fuel costs had several major power plants in Java, which are forced to burn oil-based fuel instead of cheaper gas, were supplied with sufficient gas.

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB <u>MAR</u> APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : /		

3PK Serahkan Hasil Audit PLN

# Listrik tidak Perlu Naik

**JAKARTA (Media):** Pemerintah tidak perlu menaikkan tarif dasar listrik (TDL) karena dinilai masih mampu menutupi tambahan subsidi untuk menyediakan listrik sebesar Rp10,2 triliun.

Demikian penegasan anggota Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edhi dan Dito Ganindito, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, dalam menanggapi hasil audit biaya pokok produksi (BPP) listrik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diserahkan ke pimpinan DPR di Jakarta, kemarin. "Tarif dasar listrik tidak perlu naik. Pemerintah masih punya dana untuk menutup subsidi tersebut," ungkap Sapto Edhi.

Menurutnya, dana-dana tersebut berasal dari sisa anggaran 2005 yang tidak terpakai yang jumlahnya cukup besar, yakni Rp56 triliun. Sisa dana belanja anggaran 2005 tersebut di antaranya berasal dari subsidi listrik yang mencapai Rp4 triliun dan subsidi BBM sekitar Rp3 triliun. "Jadi, pemerintah tidak sulit menambah kekurangan subsidi listrik yang berdasarkan hitungan BPK sebesar Rp10,2 triliun."

Dito menambahkan, di samping masih ada dana, kenaikan tarif listrik tidak tepat jika dilakukan sekarang. Sebab, beban masyarakat akibat kenaikan BBM yang cukup tinggi tahun lalu masih sangat terasa. "Kalau pemerintah menaikkan tarif listrik, dipastikan inflasi tinggi, pengangguran akan bertambah banyak," katanya.

Adapun Paskah berpendapat pemerintah tidak perlu menaikkan tarif itu selama Perusahaan Listrik Negara (PLN) bisa melakukan efisiensi sebesar Rp4,9 triliun seperti terungkap dari hasil audit BPK.

"Kalau memang dalam audit BPK ditemukan bahwa bisa dilakukan efisiensi hingga Rp4,9 triliun, itu adalah langkah yang bagus. Berarti pemerintah tidak perlu menaikkan tarif listrik," katanya.

Menurutnya, memang ada hal yang bisa diefisienkan oleh PLN sehingga jumlah subsidi bisa ditekan dan tarif dasar listrik tidak perlu dinaikkan.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mul-

yani Indrawati mengatakan pemerintah belum bisa memutuskan tambahan subsidi listrik untuk PT PLN (persero).

"Begini saja, saya belum terima. BPK kan kirim surat ke DPR yang tembusannya ke Menkeu dan ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), nanti akan kita pelajari. Segala kemungkinan akan kita pelajari," tutur Sri, kemarin.

Menteri Koordinator Perekonomian Boediono menyebutkan pihaknya akan meminta tim teknis segera memasukkan hasil audit BPK sebagai satu pertimbangan. "Saya nggak bisa komentar sekarang," katanya.

Menurut Wakil Ketua Komisi VII Sutan Bhatoegena, pihaknya akan memulai pembahasan tarif dasar listrik 2006 dengan tim teknis tarif dasar listrik pemerintah pekan depan.

**Defisit**

Ketua BPK Anwar Nasution menyerahkan hasil audit biaya pokok produksi listrik kepada Ketua DPR Agung Laksono di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Hasil audit itu menunjukkan biaya pokok listrik PLN Rp93,2 triliun. Sedangkan pendapatan PLN dari penjualan listrik hanya Rp66 triliun sehingga masih terjadi defisit Rp27,2

triliun.

Dari defisit Rp27,2 triliun itu, katanya, pemerintah melalui APBN sudah menyetor Rp17 triliun. Sehingga, PLN perlu tambahan subsidi Rp10,2 triliun.

Agung menambahkan, hasil audi BPK tersebut akan diserahkan kepada Komisi VII DPR untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah. "Jadi, say tidak tahu apakah tarif listrik akan naik atau tidak," katanya.

Menurut Anwar, berdasarkan aud tersebut, BPK menemukan kelebihan atas biaya pokok produksi yang diajukan PLN sebesar Rp4,9 triliun. PL sebelumnya mengajukan biaya sebesar Rp98,1 triliun. Setelah diaud BPK, bisa ditekan menjadi Rp93,2 triliun, atau berkurang Rp4,9 triliun.

(Sdk/Sam/Ant/X-

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 1

TAHUN 2006

PENYIMPANGAN PROYEK

# Kapolri: PLTU Cilacap Terus Diselidiki

JAKARTA (Suara Karya): Dugaan penyimpangan pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cilacap terus diselidiki Mabes Polri. Kepada DPR, Kapolri Jenderal Pol Sutanto mengungkapkan, beragam data dan dokumen telah dikumpulkan penyidik Polri.

Menurut anggota Komisi III DPR, Azis Syamsuddin, penegean Kapolri Sutanto itu diungkapkan pada Raker dengan Komisi III DPR beberapa waktu lalu. "Waktu itu, Kapolri mengatakan kalau kasus PLTU Cilacap bukannya ditinggalkan, tetapi saat ini masih diselidiki terus," kata Aziz Syamsuddin, ketika dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (9/3).

Menurut Azis, jika kasus itu ditinggalkan, pihaknya akan menanyakan langsung kepada Kapolri. "Kami akan minta transparansi," katanya.

Menurut informasi yang diperoleh *Suara Karya*, Mabes Polri memang tengah membidik kasus dugaan *mark-up* yang terjadi pada proyek PLTU Cilacap berkapasitas 2x300 MW. Bahkan, tim penyidik telah mengumpulkan beberapa bahan untuk mengungkap kasus ini lebih jelas. "Data-data yang sudah dikumpulkan harus diolah lebih dulu. Setelah semuanya terkumpul, akan kita ungkap," kata sumber *Suara Karya* yang enggan disebutkan namanya.

Namun, pengungkapan kasus itu dilakukan setelah kasus dugaan *mark-up* proyek PLTG Borang selesai. Wakil Kepala Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Anton Bachrul Alam mengungkapkan, setelah kasus Borang selesai, penyidik Bareskrim Polri akan

terutama kasus PLTU Cilacap. Pengamat Kepolisian Parliungan Sinaga menyarankan Polri berpegang pada asas hukum, yakni persamaan perlakuan di depan hukum. Jika dalam kasus PLTU Cilacap ada bukti awal yang cukup, seharusnya Bareskrim melakukan penyidikan. "Jika tidak dilakukan, akan muncul kesan Polri pilih-pilih kasus. Seharusnya tidak boleh pilih-pilih seperti itu," katanya.

Pembangunan PLTU Cilacap dengan dana sekitar 400 juta dolar AS ini, dikabarkan terus tersendat pengoperasiannya. Rencana peresmian oleh Presiden Bulan Desember lalu, tertunda hingga kini karena masih ada masalah teknis pada pembangkit yang dibangun kontraktor dari China itu.

Karena itu, Azis mendukung Polri dalam mengungkap kasus tersebut. Dia juga berharap Polri menggunakan *kaldu* hukum yang berlaku. Unsurnsurnya juga harus terpenuhi dan jangan rakan kesan pemaksaan. "Kalau dalam pengerjaan PLTU Cilacap ternyata ada penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara, kasus itu harus dilanjutkan. Yang penting, kalau Kapolri harus ditindaklanjuti," katanya.

Untuk penyidikan kasus ini, kata Azis, Kapolri menugaskan Kepala Badan Reserse dan Kimial (Bareskrim) Polri Komjen Pol Makbul Padmanagara. "Perlu transparansi dari Polri, kalau memang Polri sedang mengungkap kasus PLTU Cilacap, jelaskan kepada masyarakat, supaya masyarakat tahu kalau Polri sudah bekerja, dan memahami kesulitan yang dihadapi penyidik Polri,"

**"Jika kasus itu ditinggalkan, pihaknya akan menanyakan langsung kepada Kapolri."**

**Azis Syamsuddin, Anggota Komisi III DPR**

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2006

## Berantas KKN di Tubuh PLN Dulu

### Redaksi Yth,

Belum lama ini, PLN (Perusahaan Listrik Negara) telah mengisyaratkan akan menaikkan tarif dasar listrik (TDL). Rencana kenaikan TDL ini tidak tanggung-tanggung, diperkirakan mencapai 30% - 80%. Di tengah situasi sulit ekonomi masyarakat akibat dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ditambah dengan melonjaknya harga beras dan gula pasir, akhir tahun lalu, kenaikan TDL tentunya memberatkan masyarakat.

Keputusan menaikkan TDL yang direncanakan akan diberlakukan mulai Maret, tentunya merupakan kebijakan yang kurang populer di mata rakyat.

Kita semua mengetahui, bahwa inflasi bulanan telah mencapai angka rekor, 8,7%, suku bunga naik, dan pengangguran serta kemiskinan bertambah dengan cepat. Data terakhir BPS (Badan Pusat Statistik) pada Oktober 2005 menyebutkan, angka pengangguran tercatat 11,6 juta jiwa dan jumlah rakyat miskin mencapai 36-37 juta jiwa.

Dengan kondisi ini, laju ekonomi pun praktis terhambat. Dari sisi pemerintah sendiri ternyata harus mananggung beban pengeluaran yang cukup besar akibat naiknya belanja negara dan bunga utangnya.

Namun, kalau mau jujur, kenaikan tarif dasar listrik sebenarnya dapat dicegah sejak dini apabila kegiatan inefisiensi, biaya tinggi, dan praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) di tubuh PLN dapat diantisipasi.

Dugaan praktik korupsi yang terjadi di tubuh PLN membuktikan bahwa selama ini hukum belum dapat diposisikan sebagai landasan moralitas dan ordinate, melainkan sebagai sub-*ordinate* yang boleh direkayasa dengan berbagai cara untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu, seyogianya kasus-kasus KKN yang melanda BUMN terbesar tersebut harus segera diberantas terlebih dahulu.

WORD SEMBODHRO

Jl. Mawar 54A Baciro, Yogyakarta

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE:  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: /

TAHUN 2006

## Paskah Menilai Tarif Listrik tak Perlu Naik

JAKARTA — Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, menilai, pemerintah tak perlu menaikkan tarif dasar listrik (TDL). Alasannya, kemungkinan untuk menambah subsidi masih terbuka, dan akan dibicarakan dengan DPR.

Apalagi, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik, bisa dihemat sebesar Rp 4,5 triliun. "Belum tentu pemerintah memutuskan akan menaikkan tarif listrik," kata Paskah, Kamis (9/3).

BPP listrik hasil audit BPK, yang kemarin diserahkan kepada Ketua DPR, Agung Laksono, mencapai Rp 93,2 triliun atau Rp 832,88 per kwh. Angka BPP itu lebih rendah dari

yang diajukan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 98,1 triliun atau Rp 870,21 per kwh.

Menurut Ketua BPK, Anwar Nasution, BPP yang diajukan PLN lebih besar Rp 4,9 triliun. Rinciannya, Rp 3,6 triliun (73 persen) untuk biaya bahan bakar dan sisanya Rp 1,3 triliun (27 persen) untuk koreksi biaya listrik swasta, penyusutan, kepegawaian, pemeliharaan, administrasi, dan biaya pinjaman.

"Angka BPP rata-rata ini dihitung dengan asumsi kurs dolar Rp 9.700, inflasi lokal delapan persen, dan harga BBM solar Rp 5 ribu per liter," kata Anwar.

Sementara, pendapatan PLN dari penjualan tenaga listrik sebesar Rp 66 triliun. "Selisih antara BPP dan

pendapatan PLN itu menyebabkan defisit Rp 27,2 triliun," katanya.

Suntikan pemerintah untuk tahun ini ke PLN Rp 17 triliun, sehingga kekurangan subsidi Rp 10,2 triliun. Namun, BPK menemukan potensi penghematan BPP Rp 12,1 triliun yang berasal dari efisiensi 10 instalasi pembangkit di Jawa-Bali berbahan bakar gas dan BBM.

Tingginya BPP listrik PLN pada 2006, kata Juru Bicara PLN, Muljo Adji, karena asumsi yang dipakai berbeda dengan BPK. Dalam menyusun rencana kerja anggaran perusahaan 2006, PLN menggunakan asumsi kurs dolar AS Rp 9.700, harga BBM solar Rp 6 ribu per liter, inflasi delapan persen, dan target penurunan losses 9,72 persen. ■ dia/ant

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input checked="" type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9	10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31									
HALAMAN : /											TAHUN 2006

# PLN Bocor Lima Triliun Ngapain Listrik Naik

## Paskah Setuju, Boediono Masih Ragu-ragu

Hasil audit BPK menyebutkan ada kebocoran di PLN senilai Rp 5 triliun. Artinya, tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk menaikkan tarif listrik.

KETUA Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution menemukan selisih yang cukup signifikan terhadap Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik PT PLN (persero). Temuan tersebut disampaikan Anwar kepada Ketua DPR Agung Laksono di Gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, perhitungan BPP listrik PLN merupakan salah satu syarat yang diajukan DPR, sebelum tarif listrik dinaikkan. Jika di BPP tersebut, PLN terlihat kekurangan dana, maka listrik akan dinaikkan. Tapi, bila yang nampak adalah pemborosan, mark up atau kebocoran dana, maka tarif listrik tidak perlu dinaikkan.

Dari laporan BPK kemarin yang terjadi adalah kebocoran dana alias mark up biaya sebesar Rp 4,9 triliun. Menurut Anwar, semula PLN mengajukan BPP listrik sebesar Rp 98,1

triliun. Setelah diaudit, angka tersebut dikoreksi menjadi Rp 93,2 triliun. Artinya ada selisih Rp 4,9 triliun. "BPP itu kan langsung terkait dengan TDL. Dengan hasil audit BPK itu, jelas menguatkan bahwa TDL belum layak dinaikan. Itu kan sudah bukti ada kebocoran dana di PLN," ujar anggota Komisi VII DPR dari F-PAN Alvin Lie saat dihubungi *Rakyat Merdeka*, menanggapi temuan BPK, kemarin.

Alvin menandaskan temuan BPK tersebut akan ditindaklanjuti DPR. "Kalau ternyata, ada indikasi *markup* atau kebocoran, tindakan hukum yang harus jalan," tegasnya.

Sebelumnya, usai bertemu BPK, Ke-

tua DPR Agung Laksono menandaskan, jika hasil laporan audit BPP PLN tersebut nanti akan dibahas di Komisi VII.

Dalam hasil audit BPK sendiri disebutkan, koreksi terbesar ada di kebutuhan bahan bakar yaitu sebesar 73 persen atau Rp 3,6 triliun. Sisanya, yang 27 persen atau Rp 1,3 triliun adalah koreksi atas biaya listrik swasta, penyusutan, kepegawaian, pemeliharaan, administrasi dan biaya pinjaman. "BPP yang diajukan PLN pada awalnya Rp 98,1 triliun, kita koreksi menjadi Rp 93,2 triliun. Jadi ada Rp 4,9 triliun yang dikoreksi," jelas Anwar.

Biang kerok bengkaknya BPP itu ada di biaya bahan bakar yang menyedot

sekitar Rp 55,3 triliun atau sekitar 55,3 persen dari keseluruhan biaya. Ironisnya, 10 instalasi pembangkit Jawa Bali dengan daya 3.301 MW yang bisa menggunakan gas dan BBM, terpaksa memakai BBM karena tiadanya pasokan gas. Padahal jika menggunakan gas, ada Rp 12,1 triliun.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Humas PT PLN Pusat Ario Subijoko menyatakan selisih itu terjadi karena perbedaan asumsi harga yang ditetapkan PLN dan BPK. "PLN merubah asumsi harga gas dan batubara karena mendapatkan informasi bahwa harga gas naik 20 persen dan harga batu bara naik 15 persen. Itu yang kita gunakan. Sementara, BPK sendiri menggunakan asumsi lama," jelasnya.

#### Sikap Dua Menteri Beda

Menanggapi temuan ini, Meneg PPN/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, mengatakan, pemerintah tidak perlu menaikkan TDL selama hasil audit BPK menunjukkan pemborosan dana sekitar Rp 4,9 triliun.

"Kalau memang dalam audit BPK ditemukan bahwa bisa dilakukan efisiensi hingga Rp 4,9 triliun, itu adalah langkah yang bagus. Berarti pemerintah tidak perlu menaikkan TDL seharga yang sebagaimana disimulasikan," kata Paskah di Gedung MPR/DPR Jakarta, Kamis.

Berbeda dengan Menko Perekonomian Boediono. Pihaknya masih mempelajari hasil audit BPK sebelum memutuskan kenaikan listrik. "Saya

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE :  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB **MAR** APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7.6

# Swasta klaim bangun PLTA

TAHUN 2006

## lebih murah ketimbang PLN

BISNIS INDONESIA

MEDAN: Pemerintah seharusnya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada swasta untuk membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Indonesia.

Pasalnya, berdasarkan pengalaman selama ini pembangunan PLTA yang dilakukan swasta lebih murah jika dibandingkan dengan PLN.

Menurut pemerhati masalah kelistrikan Sumut Herald Sihombing, pembangunan PLTA yang ada di daerah itu seperti

PLTA Sipansihaporas, Tapanuli Tengah, PLTA Lau Renun Dairi yang dikerjakan PT PLN biayanya cukup tinggi.

Misalnya, untuk menghasilkan energi listrik 1 MW di proyek PLTA Sipansihaporas, PLN mengeluarkan biaya investasi Rp34,5 miliar atau dengan total biaya Rp1,725 triliun untuk kapasitas terpasang 2x25 MW. PLTA Lau Renun mengeluarkan biaya Rp79,9 miliar untuk 1 MW dengan total investasi Rp3,99

### Perbandingan biaya investasi berbagai pembangkit (US\$ juta MW)

Jenis	Sumber daya	Investasi
PLTGU	Gas	0,8-1
PLTU	Batu bara	0,9-1
PLTP	Panas bumi	1,3-2
PLTA	Air	1,7-3

Sumber: PLN, diolah

triliun dengan kapasitas terpasang 2x41 MW.

"Kalau swasta yang membangun pembangkit listrik tersebut pasti jauh lebih murah dengan kualitas yang sama. Swasta yang profesional bisa

membangunnya dengan biaya Rp12 miliar untuk menghasilkan setiap 1 MW," kata Herald, pekan ini.

Secara terpisah, salah satu kontraktor di Sumut, Nelson Matondang membenarkan tingginya biaya pembangunan PLTA yang dikerjakan PLN. Berdasarkan hitung-hitungan yang dilakukannya, kata Nelson, untuk membangun PLTA di manapun tempatnya, dia mengklaim sanggup membangun dengan biaya Rp12 miliar untuk 1 MW.

"Cost yang dikeluarkan swasta jauh lebih murah bila dibandingkan dengan PLN. Harapan kita proyek PLTA itu diserahkan saja ke swasta agar lebih efisien dan harga jual tarif dasar listrik kepada masyarakat dapat ditekan."

Namun, nelson tidak merinci efisiensi dari sisi mana saja yang membuat dia sanggup menekan biaya pembangunan PLTA.

Berman Pasaribu, perwakilan PT Mega Power Mandiri (MPM) di Sumut, membenarkan murahness biaya pembangunan PLTA tersebut.

PT MPM saat ini sedang mengerjakan proyek PLTA Aek Simonggo di Parlilitan, Humbang Hasundutan dengan kapasitas terpasang 5x8 MW.

"PT MPM mengerjakan proyek itu dengan investasi tidak lebih dari Rp12 miliar untuk menghasilkan 1 MW dan kontrak yang kami tanda tangani harga jual listrik dengan pihak PLN Rp410/ kWh. Agustus ini [2006] PLTA Aek Simonggo untuk tahap pertama akan memproduksi 8 MW." (K9)